

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul skripsi **“Strategi Indonesia Menghadapi Ekspansi Pasar Cina dalam Ratifikasi Indonesia terhadap ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)”** yaitu :

Pertama, penulis tertarik terhadap inisiatif Cina yang bergabung dalam pasar ASEAN guna meningkatkan hubungan dalam bidang perdagangan regional.

Kedua, penulis tertarik terhadap alasan dan kepentingan negara-negara ASEAN untuk meratifikasi kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN – Cina, khususnya alasan Indonesia dalam menyetujui ratifikasi kesepakatan kerjasama tersebut. Mengingat sebelum bergabungnya Cina menjadi mitra dagang ASEAN, Cina telah melakukan hubungan kerjasama bilateral dengan Indonesia, dan kini hubungan tersebut lebih dipererat lagi dengan hubungan kerjasama regional ASEAN – Cina dalam bidang perdagangan yang hasilnya adalah tidak sedikit produk-produk asal Cina menguasai beberapa sektor pasar di Indonesia.

Ketiga, penulis ingin mengetahui bentuk tindakan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi ekspansi pasar Cina pasca persetujuan ACFTA tersebut.

Keempat, penulis meyakini bahwa karya ilmiah mengenai “Strategi Indonesia Menghadapi Ekspansi Pasar Cina terhadap Ratifikasi Indonesia dalam ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)” belum ada judul yang serupa. Oleh karenanya, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membuat sebuah karya ilmiah tentang hal tersebut.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi semakin besarnya arus pasar dari negara Cina yang masuk ke Indonesia pasca bergabungnya Indonesia dalam kesepakatan ACFTA.

Menjawab rumusan masalah dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesis dengan data dan fakta yang tersedia.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melengkapi syarat utama meraih gelar sarjana Strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi telah menyebabkan berbagai perubahan yang fundamental dalam tatanan perekonomian dunia baik sektor keuangan maupun perdagangan. Begitu pula sama halnya yang terjadi pada bidang perdagangan, pada awal mula

berkembangnya perdagangan yang dilakukan negara-negara awalnya hanya bersifat sederhana dan lebih sering berlangsung secara bilateral ataupun regional yang didasarkan pada kedekatan geografis. Namun, seiring perkembangan teknologi dan informasi, hubungan perdagangan antar negara yang semakin kompleks dapat dilihat misalnya dengan kelangsungan suatu transaksi yang berlangsung cepat, terjadinya persaingan dagang yang ketat baik perdagangan barang maupun jasa. Pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran bersama antar pelaku dalam perdagangan internasional, bahwa semakin diperlukannya dan dibutuhkannya suatu perdagangan bebas untuk dilakukan. Perdagangan bebas yang dimaksud adalah yang berlangsung dengan fair, tanpa dibatasi dan atau diintervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain yang bersifat proteksi dan dapat menghambat arus dan keberlangsungan perdagangan tersebut.

Perdagangan bebas memiliki banyak tujuan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kemakmuran bagi negara-negara yang terlibat, serta memiliki harapan dapat menciptakan suatu tatanan perekonomian yang stabil dan saling menguntungkan serta untuk menarik para investor agar menanamkan investasi dalam negeri serta meningkatkan perdagangan diantara negara-negara dunia.¹ Atas dasar tujuan tersebut menyebabkan banyak negara-negara dunia bergabung dalam kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas yang terbentuk. Blok perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA) dapat dibentuk baik secara multilateral, regional, maupun bilateral. Salah satu FTA yang terbentuk adalah

¹Akmal Jamil. *Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, (JKAF) UGM, Vol. 2, hal. 2

ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA). Dimana Indonesia merupakan salah satu dari negara anggota ASEAN yang juga ikut bergabung dalam perjanjian kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN – Cina tersebut.

Keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan ACFTA ditandai dengan ratifikasi Indonesia dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* yang ditandatangani oleh para pemimpin negara-negara ASEAN pada tanggal 4 November 2002 di Pnom Penh, Kamboja, dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.² ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar, jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para anggota yang tergabung dalam ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina.

Dan melalui Keppres No. 48 tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004, pemerintah Indonesia telah mengesahkan ratifikasi kesepakatan tersebut. *ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)* adalah kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dengan Cina dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN dan Cina. Kesepakatan

² Nugraha, Andri Gilang. "Tantangan dan Peluang Serta Langkah – Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)." Buletin KPI edisi-02, KPI, 2010. Hal 2

ACFTA ini akan dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu: *Early Harvest Program* (EHP), *Normal Track (I and II)*, dan *Sensitive dan Highly Sensitive List*.³

Adapun tujuan dari pembentukan ACFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dan Cina yaitu menjadikan kawasan ASEAN dan Cina sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN dengan Cina. ACFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1 Januari 2010 dengan fleksibilitas terhadap produk-produk tertentu tarifnya masih diperbolehkan lebih dari 0-5%. Sedangkan, untuk negara baru seperti : Vietnam, Laos, Myanmar, dan Cambodia akan mulai diterapkan pada tahun 2015.⁴

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Cina memiliki dasar kemitraan strategis yaitu dengan dilatar belakangi oleh adanya kepentingan antar kedua negara. Cina merupakan negara Asia yang memiliki pengaruh besar dalam arus pasar global baik dari segi politik maupun ekonomi, terlebih lagi Indonesia bagi Cina adalah mitra strategis yang dapat diperhitungkan mengingat menjadi salah satu negara Asia yang mampu bertahan ditengah krisis global.

Setidaknya terdapat tiga peluang positif yang dikemukakan pemerintah pada saat kesepakatan ACFTA pertama kali ditandatangani, *Pertama*, penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan non tarif di China membuka peluang bagi

³ Dokumen BP – China, “*hubungan perdagangan Indonesia – RRT*”, Direktorat Kerjasama Bilateral I, Ditjen KPI, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Maret 2009

⁴ Dokumen Subdit Kerjasama Intra & Antar Regional, Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen KPI, Kementerian Perdagangan RI, “*Kerjasama ASEAN-China Free Trade Area.*”

Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke negara yang penduduknya terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. *Kedua*, penciptaan rezim investasi yang kompetitif dan terbuka membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China. *Ketiga*, peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas membantu Indonesia melakukan peningkatan *capacity building*, *transfer technology*, dan *managerial capability*.

Namun dengan indikasi yang cukup kuat bahwa pemerintah tidak mempersiapkan secara matang untuk meraih peluang positif dari pemberlakuan ACFTA sehingga sejak diterapkannya ACFTA di Indonesia di awal tahun 2010, perjanjian ini menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan, khususnya di kalangan sektor industri dan pasar domestik. Sebagai contoh sektor yang dinilai tidak siap dalam menghadapi ACFTA yaitu pada sektor non migas dan produk olahan seperti tekstil, elektronik dan pertanian. Hampir seluruh sektor komoditas ekonomi Indonesia dibanjiri oleh produk asal Cina yang harganya relatif lebih murah sehingga konsumen dalam negeri lebih produk-produk asal Cina daripada produk dalam negeri. Dengan semakin besarnya produk Cina yang masuk dinilai dapat mematikan daya saing pasar domestik di dalam negeri sendiri

Kuatnya iklim investasi Cina yang begitu membawa dampak besar pada kawasan ASEAN, khususnya bagi Indonesia. Hal tersebut membuat pasar domestik di Indonesia menjadi sangat tidak berimbang. Fenomena menarik tentang hal tersebut terjadi pada sektor non migas dan produksi barang olahan, dimana banyak label merk Cina telah bersaing dengan produk lokal maupun

negara pemasok lainnya. Dan bahkan produk mainan anak buatan Cina juga telah menguasai produksi mainan di pasar Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan neraca perdagangan ekspor impor antara Indonesia dengan Cina. Perbandingan neraca ekspor dan impor nonmigas antara Indonesia dan Cina selalu menunjukkan angka defisit. Data Bank Indonesia (Mei 2009) menyebutkan bahwa pada tahun 2006 Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 0,993 milyar. Pada tahun 2007 jumlahnya naik mencapai US\$ 2,708 milyar, bahkan pada tahun 2008 angka tersebut meningkat tajam mencapai US\$ 7,898 milyar. Selama tahun 2009 Cina menjadi negara pemasok barang impor nonmigas terbesar dengan nilai US\$ 12,01 milyar (BPS, 2010).⁵ Data lain yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa sepanjang Januari-November 2010, neraca perdagangan sektor non-migas Indonesia dengan China mengalami defisit US\$ 5,32 milyar. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding periode sama 2009 yang sebesar US\$ 4,29 milyar.⁶

Sektor non migas seperti hasil produk industri dan pertanian merupakan salah satu sektor yang paling rentan dalam keberlangsungan perdagangan bebas, terutama pada sektor hortikultura dan produk buah-buahan. Semakin besarnya produk Cina yang masuk dalam negeri di berbagai sektor, Artinya Indonesia lebih banyak mengimpor buah-buahan dari Cina daripada mengekspornya. Rendahnya

⁵.*Pertanian Indonesia Terancam ACFTA: Hancur Diterpa Impor, Buntung karena Ekspor.* Tersedia dalam <http://www.spi.or.id/?p=1799/> Diakses pada tanggal 28 Februari 2011

⁶ <http://swingingme.wordpress.com/2011/02/17/evaluasi-china-asean-free-trade-Area/Diakses> tanggal 1 Maret 2011

harga produk dari China telah menghantam petani buah di dalam negeri. Dengan nilai impor Januari-September 2006 mencapai US\$ 134,6 juta atau meningkat US\$ 73,8 juta dibanding periode sama tahun sebelumnya.⁷ Situasi ini jelas memperlihatkan bahwa ACFTA hanya menguntungkan perkebunan-perkebunan besar dan menghancurkan nasib para petani kecil. Dan dampak kerugian lainnya yang sangat terlihat yaitu pada industri tekstil, pada tahun 2010 berpotensi mengalami defisit perdagangan tekstil dan garmen diperkirakan mencapai lebih dari US\$ 1,2 milyar.

Kondisi rawan juga dirasakan oleh industri baja pasca berlakunya perjanjian perdagangan bebas ACFTA. Setidaknya sebanyak 662 pos tarif di sektor industri baja siap dihapuskan dengan adanya perjanjian ACFTA, dan berdasarkan data investasi menyusut sampai 25% serta potensi kerugian akibat ACFTA yang harus ditanggung industri baja bisa mencapai Rp3,78 triliun per tahun.⁸

Ancaman produk Cina tidak saja berpotensi mematikan industri besar saja, melainkan juga menjadi ancaman tersendiri bagi para pelaku usaha di industri-industri kecil dan menengah. Minimnya modal serta rendahnya tingkat daya saing dengan industri besar dalam negeri dan luar negeri juga mengancam kelangsungan hidup usaha dari para pelaku industri di tingkat kecil dan menengah.

Masih banyak lagi aksi protes masyarakat akibat mulai diberlakukannya ACFTA awal tahun 2010 lalu. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) berpendapat

⁷ Ibid evaluasi china asean free trade Area

⁸ *ACFTA industri baja bisa merugi Rp3,78 triliun. Tersedia dalam* <http://www.kabarbisnis.com/makro/industri/288911Pasca/>. Diakses pada tanggal 1 oktober 2010

bahwa sejumlah sektor di Tanah Air belum siap meghadapi pemberlakuan penuh kesepakatan ACFTA,⁹ dikarenakan apabila kerjasama ini tetap dilaksanakan, maka akan kalah bersaing dengan produk asal Cina dari segi harga yang lebih murah dibandingkan produk dalam negeri, dan hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada tutupnya sejumlah pabrik, yang dari sini tentunya dapat menimbulkan krisis sosial yang berkepanjangan akibat meningkatnya jumlah pemutusan tenaga kerja. Terutama jika dilihat dari sisi penyediaan sarana prasarana dalam negeri, termasuk regulasi dan kesiapan masyarakat dalam hal ini produktivitas tenaga kerja masyarakat serta produk-produk Indonesia yang masih rendah dinilai belum siap bersaing dengan produk-produk negara lain khususnya dengan produk asal Cina.

Namun, perjanjian tersebut telah diratifikasi dan tidak mungkin untuk dibatalkan, sehingga yang sangat dibutuhkan saat ini adalah menyiapkan strategi untuk menghadapi semakin membanjirnya produk-produk Cina di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan memiliki langkah strategis dalam menghadapi semakin besarnya arus pasar Cina yang masuk dan bersaing dengan pasar industri domestik dalam negeri Indonesia pasca ratifikasi kesepakatan ACFTA.

⁹ *ACFTA tidak berdampak pada tekstil sintesis*. Tersedia dalam <http://bataviase.co.id/detailberita-10493463.html>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2011

D. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ekspansi pasar Cina terkait dengan diratifikasinya *ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)* ?

E. Kerangka Pemikiran

Perspektif strategis adalah asumsi bahwa perilaku pembuat keputusan politik luar negeri bersifat rasional, yaitu bahwa pemilihan suatu strategi sungguh-sungguh yang didasarkan pada pertimbangan untung-rugi dalam pencapaian suatu tujuan yang jelas. Umumnya perancangan strategis politik luar negeri tidak didasarkan pertimbangan moral, keyakinan, atau hal-hal emosional. Juga perancangan strategis adalah tindakan yang penuh perhitungan; bukan tindakan untung-untungan.¹⁰ Untuk dapat menghadapi semakin deras arus pasar Cina yang menembus masuk pasar Indonesia, maka strategi mendasar yang dilakukan adalah strategi penguatan daya saing global.

Strategi tersebut berkaitan pada politik luar negeri suatu negara untuk mencapai kesejahteraan ekonominya. Untuk menjelaskan strategi penguatan daya saing global dalam menghadapi ekspansi pasar Cina pasca ratifikasi ACFTA, maka dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan **Konsep Kepentingan Nasional, Teori Competitive Advantages, dan Teori Merkantilisme** Karena dengan demikian pesan yang ingin digali dapat tersampaikan kepada para pembaca secara lebih dapat dipertanggungjawabkan tentang data dan

¹⁰ Mas'ood, Mohtar. *Studi Hubungan Internasional*. Studi social Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1989, hal 90.

keilmiahannya dengan tujuan agar dapat menggambarkan secara teoritis penulisan ini.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam melakukan kerjasama dengan negara lain, suatu negara tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, maka akan digunakan konsep kepentingan nasional dari Hans J. Morgenthau yang berpendapat bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan – alasan moral, legal dan ideologi yang dianggap utopis bahkan berbahaya.

Menurut Morgenthau, kepentingan suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik – teknik paksaan maupun kerjasama. Dari tujuan umum ini para pemimpin suatu negara dapat menerapkan suatu kebijaksanaan tertentu terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun paksa.¹¹

Sedangkan, menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan yang mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam menentukan politik luar negeri (*The fundamental objective and ultimate determinant that guides the*

¹¹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 141

decision maker of state in making foreign policy)¹². Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹³

Setiap negara bangsa yang ada di dunia mempunyai cara yang berbeda – beda dalam mewujudkan kemampuan dari negaranya. Selain itu, masing – masing negara bangsa tentunya memiliki prioritas yang berbeda – beda dalam politik dan kulturnya, sehingga terdapat satu kepentingan yang lebih menonjol dari yang lain. Baik itu di dalam segi pertahanan dan keamanan maupun dari segi ekonomi.

Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional juga merupakan satu faktor penting dalam melaksanakan politik luar negeri, di mana ia tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategis untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu negara.¹⁴ Setiap pemerintahan di dunia umumnya memiliki tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan yang meliputi upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan hal utama dalam penerapan politik luar negeri dari masing-masing negara.

Begitu juga dengan Indonesia melalui kerjasama ini memiliki kepentingan dimana dengan Cina sebagai potensi pengembangan pasar yang sangat besar bagi

¹² Roy Olton and Jack C. Plano. Hal. 128

⁹ Jack C. Plano, Roy Olton : *The International Relations Dictionary*, Terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press-Ltd, England 1982, Hal 7

¹⁴ Dahlan Nasution, *Konsep Politik Internasional*, Bina Cinta, Jakarta, 1983, Hal. 32

Indonesia mengingat Cina merupakan negara berjumlah penduduk terbesar dunia yaitu dengan populasi kurang lebih 1,3 milyar jiwa dan di tambah dengan ASEAN yang memiliki potensi pasar dengan jumlah penduduk 600 jiwa lebih.¹⁵ Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terbukanya peluang yang cukup besar dalam menarik investor asing dari negara Cina untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat membuka peluang usaha baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan tercapainya kepentingan nasional Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

2. Teori Competitive Advantages

Competitive Advantages atau keuntungan kompetitif adalah kelayakan finansial dari suatu aktivitas. Kelayakan finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari sudut lembaga atau individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, sedangkan analisa ekonomi menilai suatu aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Kadariah dkk, 1978). Sudaryanto dan Simatupang (1993) mengemukakan bahwa konsep yang lebih cocok untuk mengukur kelayakan finansial adalah keunggulan kompetitif atau *revealed competitive advantage* yang merupakan pengukur daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual. Keunggulan komparatif berubah karena faktor yang mempengaruhinya. Scydlofsky (1984) dalam Zulaiha (1996) mengatakan bahwa faktor-faktor yang berubah adalah ekonomi dunia, lingkungan domestik dan teknologi.

¹⁵ *Global Statistics / Population Statistics*. Tersedia dalam <http://www.geohive.com/>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2011

Para ekonom kelembagaan berpendapat bahwa kekayaan (*wealth*) berarti kesejahteraan manusia yang tidak hanya berarti materiil lahiriah semata-mata, tetapi mengandung aspek non materiil. Mereka tidak yakin akan kebenaran teori klasik dari Adam Smith yang mengatakan bahwa asal setiap unit ekonomi melakukan tindakan rasional, mengusahakan posisi optimalnya, maka mekanisme pasar akan menghasilkan keadaan yang seimbang, pada posisi optimal, yang sama dengan *full employment*.

John R. Commons (1936) dalam bukunya yang berjudul *Institutional Economics* mengemukakan pentingnya kerjasama setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menghindari konflik antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dengan apa yang disebut “pengendalian bersama” (*collective controls*), yang mempunyai tugas dalam mengawasi proses tawar-menawar dan harga serta transaksi yang dijalankan oleh para *manager* dan *rationing* (penjatahan).

Pada dasarnya setiap negara akan menghadapi keterbatasan wilayah, karena setiap negara mempunyai batas-batas geografis yang diakui oleh dunia (Samuelson dan Nordhaus, 1993 dan Yusdja, 2004). Artinya tata hubungan antar bangsa, tidak dibenarkan satu negara dengan semena-mena menguasai wilayah negara lain. Selanjutnya dikatakan bahwa keterbatasan wilayah menyebabkan setiap negara berusaha menggunakan sumberdaya yang dikuasai secara optimum untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tidak ada kegiatan antarbangsa di dunia yang lebih sering atau lebih permanen daripada perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah hal yang paling mencerminkan interpendensi antar negara tanpa banyak menghiraukan perbedaan politik di antara mereka. Seperti halnya Indonesia dengan China, dengan adanya suatu kesepakatan bersama antara Cina dengan negara-negara ASEAN dalam perdagangan bebas regional yang tercakup dalam ACFTA tentang penurunan maupun penghapusan tarif barang yang masuk antar negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ACFTA telah menjadikan kedua negara tersebut semakin erat dalam menjalankan hubungan perdagangannya. Karena dengan menjalin hubungan kerjasama regional dengan ASEAN dan Cina, Indonesia akan mendapatkan kemitraan dalam berbagai bidang dan aspek bukan hanya dengan Cina namun juga dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Namun dalam menghadapi kerjasama perdagangan bebas tersebut persaingan dagang antar negara semakin kompetitif. Dengan semakin kompetitifnya persaingan tersebut, sehingga dibutuhkan strategi-strategi terhadap penguatan daya saing global untuk menghadapi persaingan serta mampu meningkatkan daya kompetitif Indonesia terhadap negara lain. Sehingga setiap negara cenderung memperkuat diri sendiri baik secara ekonomi, politik maupun militer, karena anggapan bahwa negara lain setiap saat bisa menjadi ancaman terhadap perekonomian mereka. Penduduk suatu negara tidak dapat dengan bebas melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain, yang berarti akumulasi keunggulan daya kerja yang dimiliki suatu negara hanya dapat dikembangkan secara dominan di negaranya sendiri. Itu juga berarti bahwa negara menghadapi

keterbatasan daya tenaga kerja manusia. Karena itu dengan memaksimalkan potensi dalam negeri menjadi solusi permasalahan ruang lingkup daya kerja manusia ini.

Karena diprediksi bahwa perdagangan Indonesia pada tahun 2010 akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari target pemerintah yang ingin peningkatan ekspor dari sektor non-migas sebesar 8%. Maka cukup penting bagi pemerintah menerapkan strategi yang berbasis pada penguatan daya saing global untuk menguatkan daya kompetitif hingga mampu bersaing dengan negara lain.

3. Merkantilisme

Merkantilisme adalah suatu sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki suatu negara. Merkantilisme tertuang dalam peraturan negara yang berbentuk proteksionisme dan politik kolonial demi neraca perdagangan yang menguntungkan. Dalam kasus lain proteksi merupakan hasil yang identik dari operasi normal yang dilakukan lembaga birokrasi.¹⁶

Kaum merkantilisme menekankan perdagangan dan penciptaan keuntungan perdagangan sebanyak-banyaknya sebagai jalan menuju kesejahteraan ekonomi. Dalam pengejaran terhadap persaingan industri, merkantilisme berpendapat bahwa pengejaran tersebut tidak dapat diserahkan pada kekuatan pasar, upaya tersebut memerlukan langkah-langkah politis guna melindungi dan

¹⁶ Drs. Hendra Halwani, M.A. dan Dr. Prijono Tjiptoherijanto, *Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal 35

mengembangkan industri lokal. Seperti yang diungkapkan oleh Alexander Hamilton yang merupakan pendukung kuat merkantilisme dalam bentuk kebijakan-kebijakan proteksionis yang dimaksud untuk memajukan industri domestik dalam negeri.¹⁷

Dan menurut Friedrich List, yang mengembangkan mengenai teori kekuatan produksi yang menekankan bahwa kemampuan menghasilkan lebih penting dari hasil produksi. Dengan kata lain, kesejahteraan suatu negara tidak semata-mata tergantung pada banyaknya kekayaan, tetapi pada tingkatan negara tersebut mengembangkan kekuatannya. Suatu bangsa mampu mengembangkan kekuatan manufaktur, jika bangsa tersebut menggunakan sistem proteksi.¹⁸

Pemerintah negara mendukung ekspor dengan insentif dan menghadang impor dengan tarif. Namun pemerintah tidak lagi dapat menghadang impor dengan tarif terkait dalam perdagangan bebas hambatan dimana semua ketentuan penurunan maupun penghapusan tarif telah diatur dan disepakati dalam ketentuan perjanjian tersebut. Maka dukungan yang mampu dilakukan oleh pemerintah dalam perdagangan bebas ini yaitu dengan menerapkan hambatan non tarif sebagai upaya proteksi terhadap perdagangan dalam negeri.

Hambatan non tarif merupakan tindakan kebijaksanaan dan praktik yang menghambat volume, komposisi, dan arah perdagangan barang atau arah yang

¹⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, hal.233

¹⁸ Ibid. Hal.234

menghambat sampainya barang ke konsumen suatu negara yang tidak berbentuk pajak. Hambatan non tarif dalam perdagangan antara lain;¹⁹ 1) subsidi negara, pengadaan, perdagangan, kepemilikan negara, 2) kebijakan nasional dalam ketenaga-kerjaan, keamanan dan kesehatan, 3) pembagian kuota, 4) klasifikasi produk, 5) pengendalian pertukaran valuta asing, 6) kebijakan anggaran belanja negara, 7) hukum kepemilikan (hak paten, hak cipta), 8) penyuapan dan korupsi, 9) pemberlakuan prosedur yang tidak jelas, 10) lisensi-lisensi yang bersifat membatasi.

Berkurangnya hambatan tarif dalam perdagangan ekspor tidak selalu berarti akan semakin mudahnya ekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan kalahnya tingkat kualitas produk Indonesia bersaing dengan produk luar lainnya, khususnya dengan produk Cina yang sebelumnya telah menguasai pasar internasional terlebih dahulu.

Merujuk pada Andri Gilang Nugraha, SE, M.Fin, yang dibutuhkan dalam menghadapi pasar bebas terdapat tiga aspek besar dalam menghadapi pasar bebas ACFTA yaitu dengan melakukan penguatan daya saing global, pengamanan pasar domestik, serta penguatan ekspor.²⁰ Jika dikaitkan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, pendekatan merkantilis dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ditulis oleh penulis. Oleh karena itu, diperlukannya strategi yang

¹⁹ *Non Tariff Barrier to Trade*, tersedia dalam <http://en.wikipedia.org/nontariffbarriertotrade/htm>. Diakses pada tanggal 17 April 2011

²⁰ Andri Gilang Nugraha, SE, M.Fin, "*Tantangan dan Peluang Serta Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ASEAN-CINA Free Trade Area (ACFTA)*". Buletin KPI Edisi-02/KPI/2010.

mengatur terhadap penguatan daya saing global sebagai aksi dari proteksi pemerintah agar produk dalam negeri dapat terlindungi dari semakin besarnya ekspansi produk-produk Cina di pasar Indonesia. Bentuk strategi penguatan daya saing global yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu upaya kesiapan produk dalam negeri untuk bersaing dalam pasar global.

Melalui penerapan strategi-strategi yang dibuat, diharapkan pemerintah Indonesia dapat mengontrol arus pasar Cina yang masuk ke Indonesia dan juga meningkatkan mutu produk dalam negeri sehingga mampu untuk bersaing dengan produk-produk Cina yang semakin membanjiri pasar Indonesia. Dan diharapkan juga dapat meningkatkan devisa negara melalui ekspor dan investor-investor asal Cina yang masuk sehingga dapat menunjang pembangunan dalam negeri dan penguatan stabilitas ekonomi yang merupakan kepentingan nasional negara kita.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat hipotesa atas pokok permasalahan di atas sebagai berikut: strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ekspansi pasar Cina yaitu menerapkan hambatan non tarif yang dapat dilakukan dengan strategi penguatan daya saing global yang dapat dilakukan dengan cara diantaranya, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan standar SNI serta pengawasan terhadap ketentuan ekspor dan impor.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam upaya untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu meluas dan semakin kabur maka penulis memberikan batasan pembahasan jangkauan waktu dari data yang digunakan yaitu terutama dalam rentan waktu sebelum pemberlakuan ACFTA yang dibatasi dari Tahun 2000 hingga pelaksanaan penuh ACFTA pada tanggal 1 Januari 2010. Namun tidak menutup kemungkinan bila data yang digunakan adalah data dalam rentan waktu sebelum ataupun sesudah pemberlakuan ACFTA 2010 selama data yang digunakan tersebut masih relevan dengan isu yang dibahas. Dan juga pada hubungan perdagangan antara pemerintah Indonesia dengan Cina sebelum maupun sesudah pemberlakuan ACFTA. Jangkauan pembahasan lebih diarahkan mengenai strategi yang dilakukan Indonesia yaitu strategi-strategi terhadap penguatan daya saing global.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan berjalan dengan adanya fakta dan sistem metodologi yang baik. Pembahasan kajian ini *style-nya* adalah kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang didasarkan pada suatu kerangka teori, ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan diuji melalui data empiris. Atau secara singkat menelaah suatu prinsip-prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data sekunder atau informasi dari berbagai media cetak seperti buku, makalah, jurnal,

surat kabar, dan juga media elektronik internet serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan pemilihan judul skripsi, tujuan penulisan skripsi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

Menjelaskan mengenai isu kerjasama perdagangan bebas pada regional ASEAN dan latar belakang terbentuknya ACFTA serta tahapan-tahapan dalam implementasian penuh terhadap ACFTA.

BAB III DINAMIKA HUBUNGAN PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DENGAN CINA

Menjelaskan tentang dinamika hubungan perdagangan antara Indonesia – Cina sebelum dan sesudah ratifikasi ACFTA serta potensi pasar Indonesia bagi pasar Cina. Dan juga kekhawatiran ekspansi pasar Cina bagi industri dalam negeri.

**BAB IV UPAYA PENGUATAN DAYA SAING GLOBAL PEMERINTAH
INDONESIA TERHADAP EKSPANSI PASAR CINA PASCA
RATIFIKASI ACFTA**

Menjelaskan strategi pemerintah Indonesia dalam upaya penguatan daya saing global Indonesia pasca ratifikasi terhadap perjanjian ACFTA.

BAB V PETUTUP

Berisi mengenai kesimpulan yang menjawab hipotesa yang telah dikemukakan oleh penulis pada BAB I.